#### SISWA TIDAK TAHU ADA BOCORAN SOAL

# Sekda: Tak Ada Unsur Kesengajaan dari Guru

**DEPOK** (**KR**) - Sekda Kabupaten Sleman Harda Kiswaya menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan membocorkan soal Assesmen Standar Pendidikan Daerah (ASPD) dari guru Matematika SMPN 4 Depok. Bahkan para siswa tidak tahu soal yang dibahas dalam pendalaman materi itu akan keluar dalam ASPD.

"Informasi yang kami terima dari Tim Pencari Fakta (TPF), tidak ada unsur kesengajaan guru, tapi hanya keteledoran. Karena materi dalam pendalaman materi juga banyak," kata Harda didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sleman Ery Widaryana saat meninjau pelaksanaan ASPD ulang di SMPN 4 Depok, Kamis

Menurutnya, guru itu mendapatkan materi dari

Kepala SMPN 4 Depok. Namun guru Matematika tidak mengetahui jika itu merupakan soal ASPD. Kemudian soal itu dan beberapa materi lain digunakan untuk pendalaman materi. "Setiap menjelang ujian, sekolah sering melakukan try out. Dan materi pendalaman materi itu tidak hanya soal ASPD, tapi juga ada materi lain. Bahkan guru juga tidak tahu bahwa soal itu yang akan keluar dalam ASPD,"

terang Harda.

Di samping itu, para siswa juga tidak mengetahui soal dalam pendalaman materi akan keluar saat ASPD. Para siswa baru sadar setelah ujian selesai. Bahkan dari 130 siswa yang mengikuti ujian, hanya 21 anak yang memiliki nilai sempurna. "Bahkan ada kelas 9 C, yang nilainya 49. Itu artinya para siswa tidak tahu kalau ada bocoran soal. Mereka tahunya setelah ujian," ujarnya.

Mengenai sanksi, Harda masih menunggu pemeriksaan dan laporan akhir dari TPF. Kemudian melakukan klarifikasi ulang untuk menentukan sanksi yang diberikan ke kepala sekolah dan guru Matematika. "Ya nanti kami lihat dulu tingkat kesalahannya. Bisa lepas jabatan atau lainnya," ucap-

Plh Kepala SMPN 4 Depok Supriyana menambahkan, ASPD ulang ini hanya untuk mata pelajaran Matematika. Ada 130 siswa yang mengikuti ujian ulang dengan dibagi dua sesi. "Semua siswa hadir untuk



Harda bersama Ery meninjau pelaksanaan ASPD ulang di SMPN 4 Depok.

mengikuti ASPD ulang. guru tetap samangat untuk yang pernah diraih," tan-Kami minta para siswa dan mempertahankan prestasi

#### DINKES DAN DP3AP2KB JADI PENGAMPU Angka Stunting di Sleman Tinggal 7,24 Persen



Bupati Kustini dan Wabup Danang Maharsa saat bersilaturahmi di Dinas Kesehatan.

**SLEMAN (KR)** - Bupati Sleman Kustini menekankan penanganan stunting di Kabupaten Sleman untuk difokuskan bersama pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) sebagai dinas pengampu. Meng-

ingat angka stunting di Kabupaten Sleman saat ini mengalami perbaikan.

"Pada tahun 2017, angka stunting di Sleman ada sebanyak 11,99 persen, kemudian turun menjadi 8,38 persen pada tahun 2019, lalu pada tahun 2020 turun lagi menjadi 7,24 persen. Faktor pendorong keber-

lah satunya karena tersedianya regulasi Perbup Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif," ungkap Bupati saat bersama Wabup Daman, Kamis (15/4).

hasilan pencapaian ini sa-

stunting, kendala kurangnya SDM hampir merata di setiap OPD. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang purna tugas di Kabupaten Sleman mencapai 500 orang setiap tahunnya dan formasi pengganti tidak sebanding jumlahnya. "Kami berharap ASN di Kabupaten Sleman tetap semangat, maksimalkan kemampuan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat," ujarnya.

#### Desa Wisata Pentingsari Siap Dikunjungi



Senam bersama di Desa Wisata Pentingsari.

CANGKRINGAN (KR) -Desa Wisata Pentingsari Kalurahan Umbulharjo Cangkringan mulai mempersiapkan diri untuk menerima wisatawan saat libur Idul Fitri mendatang. Langkah ini ditempuh menyusul larangan pemerintah untuk mudik, tetapi masyarakat diimbau untuk berekreasi di destinasi wisata terdekat.

Selain melakukan pembenahan, juga digalakkan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu agenda yang ditempuh dengan menyelenggarakan senam bersama bagi warga sekitar maupun luar wilayah.

Tokoh pemuda Pentingsari Dwi Sulistyono menjelaskan, untuk membangkitkan kembali Desa Wisata Pentingsari, pihaknya melakukan berbagai upaya. Di antaranya dengan menyelenggarakan senam bersama di lokasi objek wisata. Cara ini dilakukan agar wisatawan mengetahui bahwa Desa Wisata

Pentingsari siap dikunjungi. "Pemerintah telah mengizinkan masyarakat berwi-

sata meskipun hanya untuk tingkat lokal. Maka Desa Wisata Pentingsari juga perlu mempersiapkan untuk menyambut pengunjung terutama saat libur hari raya Idul Fitri," jelasnya, Kamis (15/4).

Sementara Ketua Desa Wisata Pentingsari Doto Yogantoro berpendapat, aturan pemerintah terkait mudik lebaran harus ditaati. Untuk mencari hiburan, masyarakat diimbau mengunjungi objek wisata lokal. Peluang ini direspons dengan mempersiapkan diri menyambut masyarakat yang ingin menikmati suasana pedesaan di Pentingsari.

"Karena wisatawan besok adalah lokal, kita persiapkan program prioritas yaitu kehidupan di desa seperti pertanian, budaya maupun petualangan di alam bebas. Seperti pemandangan Gunung Merapi, bermain di aliran Kali Kuning, melihat bermacam-macam vegetasi baik kebun kopi, beragam jenis tanaman obat," terang

(Has)-f

nang Maharsa bersilaturahmi ke Dinas Kesehatan dan Dinas P3AP2KB Sle-Selain permasalahan

#### Kemenkes Minta Sleman Miliki Perda KTR jungan Kementerian Kesehatan

SLEMAN (KR) - Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Sleman sudah berjalan dan sudah berpayung hukum melalui Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2012. Selain itu, implementasi KTR di Kabupaten Sleman masih terus ditingkatkan dimulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat permainan anak, rumah ibadah, tempat kerja, serta ruang layanan publik.

"Dengan kemajuan teknologi saat ini, perlu adanya pendampingan orangtua terhadap anak-anak agar terhindar dari rokok," ujar Bupati Sleman Kustini saat menerima kundan Kementerian Dalam Negeri di Pendapa Parasamya Pemkab Sleman, Kamis (15/4).

Kunjungan tersebut untuk memantau perkembangan kesehatan dan KTR di Kabupaten Sleman. Pada kesempatan itu juga ditandatangani komitmen KTR oleh Bupati Sleman, Kemenkes, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku Akademisi.

Sementara Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular (CP2PTM) yang diwakili Dr Sandra Diah Ratih mengapresiasi Pemkab Sleman yang sudah berupaya dengan pemberlakuan KTR melalui Peraturan Bupati tersebut. Diharapkan ke depannya Pemkab Sleman memberlakukan Peraturan Daerah mengenai KTR.

"Kami berharap bahwa seluruh kabupaten kota di Indonesia harus sudah mengimplementasikan sistem kawasan tanpa rokok, sampai dengan seratus persen pada tahun 2024. Saat ini Kementerian Kesehatan RI sedang berupaya membangun sistem monitoring menggunakan gadget yang harapannya bisa berjalan dengan baik sampai dengan bulan September di tahun ini,

## Raker Badko TKA-TPA Rayon Ngemplak

NGEMPAK (KR) - Badan Koordinasi (Badko) TKA-TPA Rayon Ngemplak mengadakan rapat kerja (raker). Kegiatan itu dalam rangka meningkatkan Ukhuwah Islamiyah dan jalinan komunikasi yang intensif serta membentuk jaringan kerja yang kuat antara Unit TKA-TPA dengan BADKO TKA-TPA Rayon Ngem-

Ketua Badko TKA-TPA Rayon Ngemplak Mujiyono menjelaskan, raker diikuti 80 ustadz-ustadzah yang merupakan utusan dari 48 Unit TKA-TPA di wilayah Kapanewon Ngemplak.

"Raker sebagai sarana untuk membuat rancangan Program Kerja Tahun 2021. Kemudian dibagi dalam 3 Sidang Komisi yaitu Komisi A, B dan C serta Sidang Pleno (Pengesahan Program Kerja Tahun 2021)," jelasnya, kemarin.

Adapun Program kerja tahun 2021 yang telah dibuat yakni meng-upgrade data unit TKA-TPA. mengadakan pelatihan ustadz-ustadzah tingkat dasar, pelatihan tartil. Selain itu mengadakan silaturrahmi ke unit TKA-TPA dan pejabat, membagikan buku pedoman kerja, mengadakan pelatihan kewirausahaan.

"Nanti kami juga akan mengadakan temu santri



Peserta Raker Badko TKA-TPA rayon Ngemplak.

secara virtual, mengagendakan temu ustadz-ustadzah, mengumpulkan Kabupaten Sleman. Kemu-

gedung dakwah TKA-TPA

dana untuk pembangunan dian mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan," terangnya.



### Peningkatan Kapasitas UMKM Penunjang Pariwisata

**Nurhidayat AMd** 

KR-Saifullah Nur Ichwan

SLEMAN (KR) -Pelaku UMKM yang ketergantungan dari sektor pariwisata di Sleman cukup besar. Dengan kondisi pariwisata yang belum pulih, UMKM perlu ada peningkatan kapasitas dan penguatan modal agar tetap eksis di tengah pandemi Covid-19.

Anggota **DPRD** Kabupaten Sleman dari Fraksi PAN Nurhidayat AMd mengatakan, dengan lesunya sektor pariwisata ini menjadikan pelaku UMKM juga terkena dampaknya.

Nurhidayat Khususnya UMKM pesekitar objek wisata, penjual oleh-oleh, kerajinan, kuliner dan lainnya.

"Ketika pariwisata sepi pengunjung, otomatis pelaku UMKM penunjang pariwisata mengalami hal yang sama. Soalnya mereka saling keterkaitan satu sama lain," kata Nurhidayat.

Padahal, pelaku UMKM penunjang pariwisata ini justru mayoritas warga Sleman. Untuk itu, Dayat selaku Ketua Komisi B DPRD Sleman berkomitmen untuk memperhatikan nasib para pelaku UMKM, khususnya penunjang pariwisata. "Kami berkomitmen bagaimana UMKM tetap bisa jalan dan eksis. Jangan sampai mereka dibiarkan gulung tikar atau bangkrut," tegas Dayat.

Langkah yang dilakukan Komisi B saat

ini telah berkoordinasi dengan mitra kerjanya Anggota DPRD Sleman dari Fraksi PAN yakni Bank BPD DIY dan Bank Sleman. Dimana kedua mitra kerjanya itu diminta supaya memprioritaskan pemberian kredit bunga rendah tanpa jaminan. "Kedua bank itu kan milik pemerintah daerah. Kami minta mereka memprioritaskan pemberian kredit kepada UMKM tanpa jaminan dan bunga rendah. Supaya mereka tetap bisa produksi atau aktivitas kembali," ujarnya.

Di samping itu, Komisi

B juga minta kepada nunjang pariwisata seperti pedagang di Dinas Koperasi dan UMKM supaya memberikan pelatihan peningkatan skil di bidang digital marketing. Dengan harapan para pelaku UMKM bisa memasarkan produknya secara online. "Sekarang ini serba online. Jadi pelaku UMKM harus dididik untuk pemasarkan secara online. Selain itu mendorong UMKM bisa membaca peluang lain agar tetap bisa eksis,"

> Tak hanya itu, Komisi B juga secara tegas terhadap anggaran yang berkaitan dengan orang banyak, orang miskin, UMKM dan koperasi tidak boleh dirasionalisasi. Justru anggarannya ditambah. "Anggaran itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Ketika mereka itu bisa beraktivitas, ekonomi akan tetap berjalan," (Sni)-f pungkasnya.

